

# Saatnya beraksi : Mengubah budaya anti-korupsi menjadi gaya hidup

**Muhammad Reyhan Firmansyah**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: huhsayayeshes@gmail.com

## Kata Kunci:

Korupsi, anti-korupsi, mahasiswa, integritas, pendidikan karakter

## Keywords:

Corruption, anti-corruption, student, integrity, education

## ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, dan telah menyebar ke lingkungan pelajar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya membangun budaya anti-korupsi sebagai gaya hidup di kalangan generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (penelitian pustaka) dengan meninjau berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait pendidikan anti-korupsi dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku korupsi dipengaruhi oleh faktor

internal, lingkungan, dan struktural, seperti lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas, tekanan akademis, dan sistem yang tidak mendukung. Diskusi menekankan bahwa pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Implementasi budaya anti-korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan akademis dan non-akademis, termasuk organisasi mahasiswa dan penggunaan media digital. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan melalui penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

## ABSTRACT

Corruption is a serious problem that hinders social, economic, and political development in Indonesia, and has spread to the student environment. This study aims to analyze the importance of building an anti-corruption culture as a lifestyle among the younger generation. The method used in this study is a literature study (library research) by reviewing various relevant scientific sources related to anti-corruption education and Pancasila values. The results show that corrupt behavior is influenced by internal, environmental, and structural factors, such as weak internalization of integrity values, academic pressure, and an unsupportive system. The discussion emphasizes that character education based on Pancasila values plays a crucial role in instilling honesty, responsibility, and integrity. The implementation of an anti-corruption culture can be done through academic and non-academic activities, including student organizations and the use of digital media. In conclusion, students have a strategic role as agents of change in building a sustainable anti-corruption culture through the application of integrity values in everyday life.

## Pendahuluan

Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaannya, yang dapat merugikan



keuangan atau perekonomian Negara. Ahli sejarah dan sosiolog memperdebatkan apakah korupsi di Indonesia berasal dari masa penjajahan meskipun telah ada sejak zaman colonial. (Safira, 2024)

Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, korupsi telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di tingkat pemerintahan, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tindakan tidak jujur, penyalahgunaan kepercayaan, dan perilaku mengabaikan nilai integritas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan budaya anti-korupsi sejak dini dan menjadikannya sebagian dari gaya hidup. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial perlu diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anti-korupsi tidak hanya menjadi slogan atau wacana, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri setiap individu, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. (Meinardy, 2021)

Korupsi tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. (Fanani, 2025) Mahasiswa, yang akan menjadi pemimpin di masa depan, diharapkan tidak melakukan tindakan korupsi. Namun, beberapa mahasiswa justru berani melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka percaya bahwa tindakan korupsi dilakukan oleh orang lain sebagai tindakan negative. Namun, pemikiran mahasiswa akan tindakan korupsi menjadi lebih toleran, terutama jika tindakan tersebut melibatkan diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dan penerapannya dalam kehidupan nyata. (Prayoda, 2025)

Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membantu membangun moral setiap orang dan struktur sosial. Nilai-nilai pancasila adalah dasar moral bangsa yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini harus mendasari setiap aspek kehidupan bangsa, termasuk upaya untuk membuat sistem yang bebas dari korupsi. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar moral dan filosofis untuk membuat hukum yang adil dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

Oleh Karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran bahwa perilaku antikorupsi bukan hanya sebatas pengerahuan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Mahasiswa perlu dibiasakan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam berbagai situasi, baik dalam lingkungan akademik maupun social. Dengan demikian, sikap antikorupsi dapat berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dan akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup individu. Hal ini menjadikan penting untuk mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya menggunakan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu buktinya adalah adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menerapkan program pendidikan

antikorupsi dari jenjang sekolah dan madrasah hingga pendidikan tinggi tadarus tahun 2019. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas serta mendorong terciptanya budaya antikorupsi yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an tumbuh di tengah arus global teknologi informasi dan digital. Cara generasi ini berpikir, berinteraksi, dan belajar dipengaruhi oleh banyaknya media sosial dan akses informasi. Sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk dididik secara moral agar mereka dapat memahami bahaya korupsi. Mengklaim bahwa menanamkan nilai anti-korupsi pada Generasi Z adalah langkah penting untuk mencegah perilaku koruptif di masa mendatang.

Secara keseluruhan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena melanggar hukum dan merusak moralitas, nilai sosial, dan keyakinan agama masyarakat. Akibatnya, pendidikan Pancasila memiliki peran strategis yang signifikan dalam membangun karakter bangsa yang bermoral dan berkepribadian antikorupsi sejak dini. Dengan memberikan pendidikan yang menyeluruh, terutama untuk Generasi Z, yang akan menjadi pemimpin masa depan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepuasan sosial dapat ditanamkan secara mendalam. Selain itu, hukum tidak cukup untuk memerangi korupsi, pendidikan moral dan karakter harus ditanamkan sebagai dasar negara yang bersih berkeadilan.

Korupsi di dunia saat ini dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak hanya faktor dalam diri seseorang, tetapi juga perubahan yang terjadi di luar, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai sosial. Media digital yang semakin populer memungkinkan orang, khususnya generasi muda, terpapar berbagai bentuk perilaku, baik positif maupun negatif. Tanpa filter moral yang kuat, situasi ini dapat menyebabkan sikap toleran terhadap tindakan menyimpang, termasuk korupsi sederhana. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan etika harus diperkuat untuk menjaga informasi yang tak terbatas.

Selain itu, sebagai kelompok yang tumbuh di era digital, Generasi Z memiliki fitur yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih kritis, fleksibel, dan toleran terhadap perubahan, namun mereka juga rentan terhadap tekanan sosial dan budaya instan. Dengan demikian, pendekatan pendidikan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari menjadi penting. Pendidikan antikorupsi harus mencakup kognitif, afektif, dan perilaku agar prinsip-prinsip yang diajarkan dipahami dan diinternalisasi. Oleh karena itu, membangun budaya antikorupsi memerlukan partisipasi semua pihak, seperti keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Diperkirakan bahwa ketika semua komponen bekerja sama, lingkungan akan menjadi lebih baik untuk membangun individu yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.

### **Latar Belakang Perilaku Korupsi dan Urgensi Budaya Anti-Korupsi**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan

hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian Negara. (Suriyadinata et al., 2023)

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menerapkan program pendidikan antikorupsi sejak tahun 2019. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini.

## **Pembahasan**

### **Pengertian dan Bentuk Korupsi**

“corruption” adalah kata latin untuk “korupsi”, dan “corruption” adalah kata Inggris untuk “korupsi”. Korupsi didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, yang dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari moralitas. Dengan demikian, korupsi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk, tidak amanah, atau tidak jujur. Ini dapat termasuk jabatan di institusi atau aparat pemerintah, pemberian jabatan juga dapat menyebabkan korupsi dengan menyelewang kekuasaan. Ekonomi, politik, dan hubungan keluarga atau kerabat adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi ini. Oleh karena itu, korupsi juga dapat dianggap sebagai tindakan curang yang berbahaya bagi negara. Korupsi telah menjadi salah satu masalah yang mengganggu manusia selama bertahun-tahun. Perilaku korupsi dikategorikan sebagai penyuapan dalam masyarakat Yahudi, Cina, Yunani, Jepang, dan Romawi.

Proses perilaku yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk meningkatkan, memperbaiki, dan menambah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku mereka sendiri dikenal sebagai pendidikan. Akibatnya, pendidikan dianggap berguna untuk mencegah korupsi. Psikologi seseorang juga akan dipengaruhi oleh perubahan yang diterima ini. Dari menentang korupsi secara tegas mengizinkan dan memanfaatkan para koruptor, ada pergeseran. Ini tidak akan terjadi jika generasi muda tidak dididik untuk mengubah sistem nilai yang diwariskan untuk mencegah korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melanggar aturan umum dan dapat berdampak buruk pada ekonomi atau keuangan suatu negara dan menghambat kemajuan tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi, korupsi harus dihentikan dan dihapus

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dengan kata lain, pendidikan anti-korupsi mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal seperti mencuri, berbohong, dan menipu orang tua atau teman kita.

Salah satu strategi jangka panjang untuk mencegah korupsi adalah pendidikan anti korupsi, yang harus melibatkan seluruh bagian masyarakat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Karena pelajar adalah bagian penting dari masyarakat, peran mereka diharapkan. Perlu kita ketahui bahwa korupsi dapat terjadi jika tiga komponen

utama digunakan: niat, kesempatan, dan kewenangan. Korupsi tidak terjadi jika salah satu atau lebih faktor utama tidak bertemu. Jadi, anggota korupsi sebenarnya berarti mengurangi komponen ketiga ini. (May et al., 2025)

### **Faktor penyebab Korupsi di Kalangan Mahasiswa**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku korupsi di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai integritas. Banyak mahasiswa mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang salah, namun belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Lingkungan yang permisif terhadap kecurangan akan membuat individu menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang wajar. Hal ini sejalan dengan pendapat (Faslah, 2025) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai moral seseorang. Tekanan akademik, keinginan untuk mendapatkan hasil instan, serta lemahnya pengawasan juga menjadi penyebab munculnya perilaku tidak jujur. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar.

Selain faktor internal dan lingkungan, faktor struktural juga berperan dalam mendorong pelajar untuk berperilaku korup. Sistem pendidikan yang terlalu menekan pada hasil daripada proses pembelajaran dapat memicu siswa untuk mencari cara cepat untuk mencapai nilai. Tidak jujur, seperti mencontek atau plagiarisme, sering kali dianggap sebagai solusi instan yang dapat diterima dalam situasi seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai moral yang kuat bersama dengan tekanan akademik yang tidak diimbangi dapat menyebabkan perilaku menyimpang.

Sebaliknya, kurangnya contoh dari lingkungan sekitar juga merupakan faktor penting. Mahasiswa yang tinggal di lingkungan yang memungkinkan korupsi cenderung memandang korupsi sebagai hal yang wajar. Misalnya, tindakan kecil seperti penipuan data, titip absen, atau perlindungan kampus sering dianggap sepele, meskipun ini merupakan awal dari perilaku koruptif yang lebih besar. Kebiasaan ini dapat berkembang menjadi pola perilaku yang stabil jika tidak ditangani sejak dini. Tidak adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif adalah faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran akademik dapat membuat siswa tidak takut untuk melakukannya lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rochim et al., 2025) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam suatu lembaga. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang konsisten, pendidikan yang adil, dan sanksi yang adil diperlukan untuk memberi tahu siswa betapa pentingnya menjaga integritas setiap saat.

### **Pentingnya Budaya Anti-Korupsi sebagai Gaya Hidup**

Budaya anti-korupsi merupakan sekumpulan nilai dan kebiasaan menolak segala bentuk tindakan korupsi. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedian, dan keberanian dalam menolak tindakan menyimpang. Menjadikan anti-korupsi sebagai gaya hidup sehari-hari, bukan hanya dalam situasi tertentu. Hal ini penting karena perubahan besar dalam masyarakat dimulai dari perubahan kecil pada

individu. Jika setiap individu memiliki komitmen untuk bersikap jujur dan berintegritas, maka budaya korupsi dapat secara perlahan dikurangi

**Gambar 1.1** Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**Gambar 1.** Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjadi pusat pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, termasuk implementasi program pendidikan antikorupsi bagi peserta didik

*Sumber : Detik.com*

Pancasila terdiri dari nilai-nilai moral dasar yang membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Itu juga merupakan pedoman moral yang mengatur hubungan warga negara satu sama lain, pemerintah, dan lembaga negara. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan tugas negara harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk mencegah korupsi. Sikap dan etika mahasiswa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat mencegah pelanggaran moral sejak awal. Bagian yang sangat penting dari nilai-nilai Pancasila adalah menanamkan sikap toleran dan menjunjung tinggi nilai moral dalam kehidupan sosial. Karakter moral ini juga berfungsi sebagai pelindung utama terhadap tindakan korupsi yang berasal dari tingkat moral yang rendah. Pancasila tidak hanya mengatur norma dalam negara, tetapi membentuk sistem nilai yang membentuk integritas individu dan bangsa.

### **Implementasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kehidupan Mahasiswa**

Dalam membangun budaya anti-korupsi, mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat (Meinardy, 2021) nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas harus diterapkan. Misalnya, siswa dapat menghindari mencontek, tidak plagiarisme, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. (Salsabila et al., 2025) Pendidikan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berintegritas. Menurut (Suriyadinata et al., 2023), korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk besar, tetapi juga dapat dimulai dari perilaku kecil yang menyimpang dari nilai kejujuran.

Selain itu, budaya anti-korupsi tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menyebarkan nilai anti-korupsi melalui organisasi, diskusi, dan kampanye sosial.

Pendidikan pancasila mengajarkan siswa bagaimana menjadi warga negara yang mampu mengawasi dan memengaruhi kebijakan public, terutama dengan memperkuat

nilai-nilai anti korupsi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan belajar yang berbasis praktik, modul praktikum berbasis proyek warga meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan prinsip ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Modul ini juga mengajarkan mereka cara berpikir kritis, bernegosiasi, bekerja sama, sopan, toleran, dan mengambil keputusan. Pembelajaran menjadi sulit, aktif dan bermakna (Azami, 2026)

Sangat penting untuk dididik agar sikap dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, nilai-nilai Pancasila dapat dimasukkan dalam pendidikan nasional. Dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila, siswa dapat dilatih menjadi warga negara yang kuat dalam menghadapi korupsi. Beberapa saran dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk meningkatkan peran Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia :

Pertama, penguatan hukum dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap regulasi terkait pemberantasan korupsi sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta penyusunan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan menjadi lebih penting. Aparatur sipil negara, termasuk penegak hukum, perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai integritas dan etika yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Program pelatihan tersebut bertujuan agar mereka mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

Ketiga, upaya pencegahan dan deteksi korupsi dapat diperkuat melalui peningkatan keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi public. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran, yang selaras dengan prinsip demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Laporan kasus korupsi dilakukan oleh masyarakat sebagai langkah pertama. Salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan korupsi adalah laporan tindakan korupsi adalah laporan tindakan korupsi. Kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, partisipasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan, diperlukan untuk upaya ini. Sebaliknya, upaya pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara masyarakat dan lembaga penegak anti korupsi. Salah satu contoh kerja sama adalah program pelapor anonym yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sangat umum bahwa orang tidak percaya pada lembaga pemerintah saat bekerja sama.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan melalui berbagai aktivitas non-akademik dan akademik. Organisasi kemahasiswaan dapat berfungsi sebagai wadah yang bagus untuk menanamkan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi. Dalam upaya organisasi, mahasiswa diminta untuk mengelola program kerja, keuangan, dan interaksi dengan berbagai orang. Dengan cara ini, mereka mempunyai kesempatan untuk secara langsung menerapkan prinsip antikorupsi. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye sosial juga dapat digunakan sebagai cara yang menarik dan interaktif untuk mengajar. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi mereka juga dapat berbicara dan berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran satu arah tidak dianggap lebih efektif daripada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif siswa.

Penggunaan teknologi digital juga dapat menjadi cara untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan perilaku positif, melakukan kampanye anti korupsi, dan menyebarkan pesan-pesan edukatif. Pesan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasikan jika disampaikan dengan cara yang kreatif dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, prinsip antikorupsi harus diterapkan secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan pelajar. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku, tetapi menjadi bagian dari kehidupan dan karakter individu.

### **Pembentukan Sikap Antikorupsi Mahasiswa Generasi Z**

Pancasila berfungsi sebagai standar moral untuk kehidupan masyarakat. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nilai moral yang membantu orang bertindak dengan cara yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan jujur. Sebagai bagian dari kurikulum nasional, pendidikan Pancasila berfungsi untuk meningkatkan kesadaran moral siswa dan mendorong mereka untuk menjadi individu yang jujur dan antikorupsi. (Dewi, 2026)

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga untuk membentuk kepribadian dan etika sosial mereka. Pelajaran yang menekankan nilai-nilai nasional dan etika public mengajarkan siswa tentang pentingnya menjadi jujur, bertanggung jawab, dan berbagi dengan orang lain. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan warga Indonesia yang percaya, berbudi luhur, dan kompetitif. Pendidikan karakter adalah masalah yang berbeda bagi Generasi Z. karena hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi yang cepat dan terbuka, standar moral generasi ini mungkin berubah.

Tetapi mereka juga berfungsi sebagai panutan moral bagi siswa mereka. Cara yang bagus untuk meningkatkan kesadaran etis dan sikap anti-korupsi adalah melalui pendidikan berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi nilai. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial dengan mendidik siswa untuk menjadi individu yang bermoral dan berakhlak.

### **Peran Lingkungan Kampus dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi**

Lingkungan kampus sangat memengaruhi karakter siswa. Sebagai institusi pendidikan, kampus harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan aturan yang tegas dan memberikan sanksi yang mendidik untuk pelanggaran akademik.

Dosen juga bertanggung jawab untuk menanamkan prinsip anti-korupsi. Mahasiswa akan lebih mudah menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup mereka jika mereka berada dalam lingkungan yang mendukung.

### **Kesimpulan dan Saran**

Korupsi adalah masalah besar yang dapat terjadi di pemerintahan dan di kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Tidak memahami pentingnya integritas, pengaruh lingkungan, dan tekanan akademik adalah beberapa penyebabnya. Budaya anti-korupsi sejak dini sangat penting. Korupsi adalah tindakan kriminal yang berdampak luas terhadap kerusakan moral, sosial, dan ekonomi negara. Penyebab utama maraknya perilaku oruptif adalah rendahnya kesadaran moral dan rendahnya integritas individu. Akibatnya, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan karakter anti-korupsi di kalangan generasi muda.

Diharapkan siswa akan memahami arti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pengajaran yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Agar generasi Z tidak mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang, mereka harus didorong untuk memiliki keadaan kritis dan komitmen moral yang kuat.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti-korupsi dengan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara teratur, budaya korupsi dapat diminimalkan. Sangat penting bagi pendidik untuk menerapkan prinsip integritas melalui pendekatan pembelajaran inovatif dan kontekstual. Pemberantasan korupsi harus dimulai di dunia pendidikan melalui pembangunan karakter yang berkelanjutan. Siswa diharapkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan lembaga pendidikan diharapkan untuk meningkatkan kurikulum yang berbasis nilai moral dan antikorupsi. Oleh karena itu, pendidikan yang didasarkan pada Pancasila adalah fondasi utama.

Dengan kata lain, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Khususnya di kalangan generasi muda, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter yang bermoral. Diharapkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya melawan korupsi tetapi juga aktif menyebarkan budaya antikorupsi di lingkungan mereka. Namun demikian, keberhasilan usaha ini tidak hanya bergantung pada satu orang; itu juga membutuhkan sistem dan lingkungan yang baik. Pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan harus bekerja sama untuk membangun budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan

transparansi. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan integritas budaya yang kuat akan menggantikan budaya korupsi.

### Daftar Pustaka

- Azami, M. K. (2026). Pancasila Sebagai Dasar Anti Korupsi. 4, 405–412. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19554>
- Dewi, A. F. (2026). Pancasila dan pendidikan anti korupsi : Peran pendidikan pancasila terhadap pembentukan sikap anti korupsi mahasiswa generasi z. 4, 73–76. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8615>
- Fanani, A. S. (2025). Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi. 3, 269–274. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14764>
- Faslah, R. (2025). Sinergitas keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ibtidaiyah (p. 5). <https://repository.uin-malang.ac.id/24494/1/24494.pdf>
- May, I., Inggris, S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). Korupsi bukan budaya bangsa : Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. 3, 1587–1591. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/13920/5100>
- Prayoda, M. W. (2025). Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi untuk generasi muda Indonesia. 3, 223–229. <https://urj.uinmalang.ac.id/index.php/mij/article/view/19768>
- Rochim, A. S., Faslah, R., Negeri, I., Malik, M., Malang, I., Info, A., & History, A. (2025). Implementasi Sistem Pengendalian Mutu pada Lembaga Pendidikan Non Formal. 8, 8800–8807. <https://repository.uin-malang.ac.id/24492/7/24492.pdf>
- Safira, S. (2024). Penerapan perilaku pendidikan budaya anti korupsi di Indonesia saat ini. 2(12), 692–697. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20621>
- Salsabila, A. Z., Faslah, R., Negeri, I., Malik, M., Malang, I., Info, A., & History, A. (2025). Strategi Pengendalian Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. 8, 6771–6775. <https://repository.uin-malang.ac.id/24485/7/24485.pdf>